

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN**

(STUDI PUTUSAN KASUS PERKARA NO. 85/ PID.B/ 2012/ PNPWT)

TESIS

Oleh:
HANA FARIDAH
201620251007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pencurian (Studi Putusan Kasus Perkara No. 85/ PID.B/ 2012/ PNPWT)**

Nama Mahasiswa : Hana Faridah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251007

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum


Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN / 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pencurian (Studi Putusan Kasus Perkara No. 85/ PID.B/ 2012/ PNPWT)**

Nama Mahasiswa : Hana Faridah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251007

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : -

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403


Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

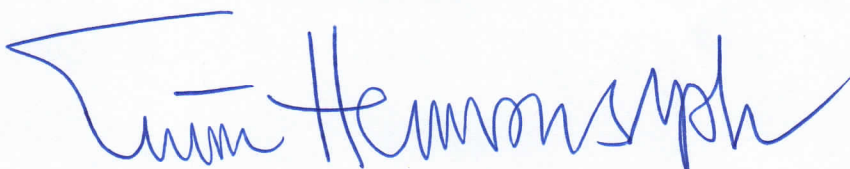
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pencurian (Studi Putusan Kasus Perkara No. 85/ PID.B/ 2012/ PNPWT).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Hana Faridah
201620251007

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil alamin, Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN KASUS PERKARA NOMOR: 85/PID.B/2012/PN.PWT.)” dengan baik dan lancar. Penulisan karya ilmiah ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.Pd., MM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah benar-benar penulis rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberi bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Kedua orangtua tercinta Bapak Sutrisno dan Ibu Narni Siti Rochanah.
6. Teman-teman tercinta yang telah memberikan dukungan serta memotivasi penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan tesis ini semoga bermanfaat bagi semua pihak.



Bekasi, Juli 2018

Hana Faridah
Hana Faridah

ABSTRAK

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebut saja istilah-istilah seperti halnya *hacking*, *carding*, *defacing*. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain dan juga pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili. Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan Internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education* telah menjadi sesuatu yang lumrah. Perkara pidana ada jika diketahui ada tindak pidana, sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) yang didapatkan melalui alat-alat bukti terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP mampu menjangkau pembuktian untuk membuktikan bahwa alat bukti rekaman CCTV adanya perluasan dalam Undang-Undang ITE Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah. Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian ini jelas tersurat dalam bunyi Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci : Alat-alat bukti, Sistem Peradilan Pidana, UU ITE.

ABSTRACT

The progress of the times and the development of technology are two things that are directly proportional to each other. This means that the more advanced an era, the more advanced technology used in that era. Lots of crime committed by utilizing information technology. Call it the terms as well as hacking, carding, defacing. These crimes in addition to causing harm to others and also the perpetrators are very difficult to track and prosecute. The need and use of information technology applied to the Internet in all areas such as e-banking, e-commerce, e-government, e-education has become commonplace. Criminal cases exist if known there is a crime, so the examination of a criminal case in a judicial process is essentially aimed at seeking material truth (*materiilewaarheid*) obtained through the evidence against the case. This can be seen from the various attempts by law enforcement agencies to obtain the necessary evidence to disclose a case either in the preliminary investigation stage such as investigation and prosecution or at the trial stage. In seeking to obtain the necessary evidence for the purpose of examination of a criminal case law enforcers are often faced with a problem or certain things that can not be solved alone due to a problem is beyond the capability or expertise. In such cases the assistance of an expert is essential in order to seek the truth. The research method used in this research is normative juridical. The system of evidence and the evidence is based on Article 184 Criminal Procedure Code can reach evidence to prove that the evidence in the CCTV footage of the extension of the Act ITE Article 184 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings of the legal evidence . Expanding the number of evidences set out in Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law. The judge must not convict unless at least two valid evidence in proving the system is clearly expressed in the wording of Article 183 Criminal Procedure Code.

Keywords: Evidence Tools, Criminal Justice System, UU ITE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana	22
2.2 Tujuan Hukum Acara Pidana	27
2.3 Pembuktian.....	30
2.3.1 Pengertian Pembuktian	30
2.3.2 Pembuktian menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981	36
2.3.3 Alat-alat bukti menurut Hukum Acara Pidana	43
2.4 Informasi dan Transaksi Elektronik	64
2.4.1 Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	64
2.4.2 Asas, Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik	67
2.4.3 Penyelenggaraan Sistem Elektronik	68

BAB III	KEDUDUKAN KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA	
3.1	Duduk Posisi Perkara kasus Nomor: 85/Pid.B/2002/PN.Pw	75
3.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	77
3.3	Pembuktian	78
3.1.1	Alat Bukti Saksi	78
3.1.2	Keterangan Terdakwa	82
3.1.3	Barang Bukti	84
BAB IV	PERBANDINGAN ANTARA KUHP DENGAN UU ITE DALAM PENJATUHAN PUTUSAN DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV	
4.1	Perbandingan antara KUHP dengan UU ITE	103
4.1.1	Alat bukti berdasarkan Pasal 5 UU ITE	109
BAB V	PENUTUP	
	Simpulan	128
	Saran	129
	DAFTAR PUSTAKA	130
	RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	